

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- A. Mukthie Fadjar, '2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*', Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Edisi 1, Cetakan ke-1, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- H. Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama, Penerbit : Zifatama Jawara, Sidoarjo.
- H. Didik Endro Purwoleksono, 2015, *Hukum Acara Pidana*, Pusot Penerbit dan Percetakan UNAIR) Airlonggo University
- Hadari Djenawi Tahir, 1981, Pokok-pokok Pikiran dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Alumni, Bandung
- Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Penerbit : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, 2020, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, Penerbit : PT. Aditya Bakti
- Solmin, Mashuriyanto, 2013, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normati : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers
- Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal :

- Dian Heny *Nastuti*, Analisis Akibat Hukum Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum Terhadap Status Hukum Terdakwa Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT), Jurnal Verstek Vol. 9 No. 1 (Januari – April 2021) Bagian Hukum Acara Universitas Sebelas Maret.

Wilhelmus Taliak, Akibat Hukum Surat Dakwaan Batal Dan Surat Dakwaan Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 1/Jan-Mar/2015.

Filemon Ketaren, Problematika Yuridis Tentang Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pidana, *Tadulako Master Law Journal*, Vol 7 Issue 1, Februari 2023.

Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011.

Djunaedi, Tinjauan Yuridis Tugas Dan Kewenangan Jaksa Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I No.1 Januari – April 2014

Winarno Budyatmojo, Dinda Agustin Wulandari, Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional / Volume 1, Nomor 4, Year 2022*

Ni'matul Huda, Sri Hastuti Puspitasari, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 3 Vol. 19 Juli 2012

Ahmad Fadlil Sumadi, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori dan Praktik, *Jurnal Konstitusi*, Volume 8, Nomor 6, Desember 2011

Johansyah, Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding), *Jurnal Solusi* Volume 19 Nomor 2, Bulan Mei 2021

Fista Prilia Sambuari, Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Lex Administratum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.